



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital. Makin Maju

Gedung Wisma BSG Lt.9 Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 <http://komisiinformasi.go.id/>

Nomor : B-185/Set.KIP.31/KU.01.09/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Tahun 2024 Audited

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala KPPN Jakarta I
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Tahun Anggaran 2024 dan telah dilakukannya reviu dari satuan pemeriksa internal serta audit dari tim pemeriksa BPK RI, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 Audited.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Bernard Yuari Putranto

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NOTA DINAS

Nomor: 80/Set.KIP.31/KU.01.09/05/2025

Kepada Yth : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Dari : Plh. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi
Pusat Tahun 2024 Audited
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Mei 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Tahun Anggaran 2024 dan telah dilakukannya reviu dari satuan pemeriksa internal serta audit dari tim pemeriksa BPK RI, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 Audited. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Bernard Yuari Putranto



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

AUDITED



**20
24**



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

AUDITED

KATA PENGANTAR

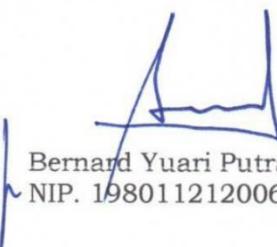
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2025
Plh. Sekretaris Komisi Informasi Pusat



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bernard Yuari Putranto".

Bernard Yuari Putranto, S.Hum., M.Si.
NIP. 198011212006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-PoS Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran dan Daftar	

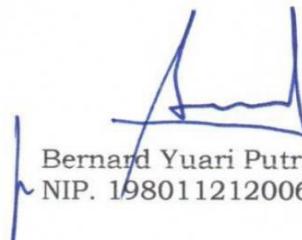
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
WISMA BSG LT. 9
JL. ABDUL MUIS NO. 40 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 34830741, FAXIMILE 021 34531734

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025
Plh. Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Handwritten signature of Bernard Yuari Putranto in blue ink, consisting of stylized loops and lines.

Bernard Yuari Putranto, S.Hum., M.Si.
NIP. 198011212006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar 10.771.537,00 atau mencapai 0,0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 42.347.206.904,00 atau mencapai 97,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 44.616.464.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.350.352.405,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 373.438.620,00. Aset Tetap (neto) sebesar 1.976.913.785,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar 41.274.526,00 dan Rp 2.350.352.405

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp

42.154.189.117,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai 42.154.189.117,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 10.439.000,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 42.143.750.117

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 2.116.392.629,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 42.143.750.117 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 42.336.435.367,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 2.309.077.879,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024				TA 2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% thd Angg
PENDAPATAN	B								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	10.771.537		0,00	-	154.291.735	154.291.735	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.771.537	-	0,00	-	154.291.735	154.291.735	0,00
BELANJA	B.2								
Belanja Pegawai	B.3	6.444.881.000	6.104.745.365	(340.135.635)	94,72	6.083.678.000	5.816.476.386	(267.201.614)	95,61
Belanja Barang	B.4	37.261.083.000	35.331.962.179	(1.929.120.821)	94,82	32.760.479.000	32.141.982.036	(618.496.964)	98,11
Belanja Modal	B.5	910.500.000	910.499.360	(640)	100,00	937.125.000	933.768.000	(3.357.000)	99,64
Belanja Bantuan Sosial			-	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
JUMLAH BELANJA		44.616.464.000	42.347.206.904	(2.269.257.096)	94,91	39.781.282.000	38.892.226.422	(889.055.578)	97,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	1.922.620	332.537
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.3	371.516.000	289.672.200
Jumlah Aset Lancar		373.438.620	290.004.737
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.4	-	-
Peralatan dan Mesin		6.101.624.008	5.423.458.589
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	49.473.000	49.473.000
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(4.174.183.223)	(3.604.604.671)
Jumlah Aset Tetap		1.976.913.785	1.868.326.918
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	-	-
Aset Lain-Lain	C.8	195.218.620	195.218.620
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(195.218.620)	(195.218.620)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		2.350.352.405	2.158.331.655
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.10	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga		41.274.526	41.939.026
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		41.274.526	41.939.026
JUMLAH KEWAJIBAN		41.274.526	41.939.026
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	2.309.077.879	2.116.392.629
JUMLAH EKUITAS		2.309.077.879	2.116.392.629
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.350.352.405	2.158.331.655

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.102.822.745	5.631.554.057
Beban Persediaan	D.3	696.511.700	481.399.900
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.158.775.383	17.562.982.715
Beban Pemeliharaan	D.5	675.450.034	583.050.944
Beban Perjalanan Dinas	D.6	13.718.716.762	13.398.037.403
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	801.912.493	692.031.316
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		42.154.189.117	38.349.056.335
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(42.154.189.117)	(38.349.056.335)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.8	10.439.000	13.999.999
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			140.291.736
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.439.000	154.291.735
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(42.143.750.117)	(38.194.764.600)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(42.143.750.117)	(38.194.764.600)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.116.392.629	1.573.222.542
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(42.143.750.117)	(38.194.764.600)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(40.027.357.488)	(36.621.542.058)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	42.336.435.367	38.737.934.687
EKUITAS AKHIR	E.5	2.309.077.879	2.116.392.629

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi publik di badan publik tingkat pusat. Organisasi dan tata kerja entitas diatur oleh Undang undang nomor 14 tahun 2008 dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Entitas berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat. Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Ketua Tim, dan 21 personal Jabatan Fungsional tertentu pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, serta tenaga PPNPN.

Komisi Informasi Pusat memiliki program prioritas sebagai berikut;

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik
3. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
4. Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Sekretariat Informasi Publik berkomitmen dengan visi “***mewujudkan masyarakat informasi yang maju, partisipatif, dan berkepribadian bangsa melalui komisi informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas***

dan sejahtera." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta perta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraaan dan keadilan.
- Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa inforasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.
- Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.

Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (MonSAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. MonSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan, Aplikasi SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran serta sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

Kominfo yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan revisi DIPA Sekretariat KI Pusat Tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 6 Februari 2024;
2. Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 22 Februari 2024 (Triwulan I);
3. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK tanggal 18 Maret 2024;
4. Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA pada tanggal 24 April 2024 (Triwulan II);
5. Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 17 Mei 2024.
6. Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA dan

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 10 Juni 2024;

7. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 19 Juli 2024;
8. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 17 September 2024.
9. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 16 Oktober 2024
10. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Revisi Blokir Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar 50% pada tanggal 18 November 2024
11. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 09 Desember 2024
12. Revisi Administrasi dalam rangka Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK pada tanggal 23 Desember 2024

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	6.444.881.000	6.444.881.000
Belanja Barang	37.261.083.000	37.261.083.000
Belanja Modal	910.500.000	910.500.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	44.616.464.000	44.616.464.000

B.1 PENJELASAN HASIL CAPAIAN OUTPUT

Berdasarkan realisasi anggaran Triwulan III TA 2024, Sekretariat Komisi Informasi Pusat berhasil meraih capaian output sebagai berikut;

No.	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	Progress Capaian
1	PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	7.018.124.000	6,721,463,042	95,77%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
2	QCB	Perkara Hukum Lembaga	2.884.613.000	2,542,401,616	88,14%	110	129	Perkara	100%
3	QIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	5.418.587.000	4,950,703,541	91,37%	130	162	Lembaga	100%
4.	QIC.002	Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan	2.602.533.000	2,451,721,205	94,21%	3	3	Lembaga	100%
5.	EBA.001	Layanan Umum Komisi Informasi Pusat	865.134.000	782,741,006	90,48%	1	1	Layanan	100%
6.	EBA.994	Layanan Perkantoran	23.893.227.000	23,158,055,142	96,92%	1	1	Layanan	100%
7.	EBB.001	Layanan Sarana Internal KI Pusat	910.500.000	910.499.360	100%	52	135	Unit	100%
8.	EBD.001	Layanan Perecanaan dan Penganggaran KI Pusat	573.822.000	397,388,674	69,25%	3	3	Layanan	100%
9.	EBD.002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat	449.924.000	432,234,272.	96,07%	4	4	Dokumen	100%

B.2 Capaian Kinerja Strategis dan Catatan Penting Lainnya

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Informasi (KI) untuk menyelesaikan sengketa informasi, menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar dan strategis. Di Indonesia hanya KI satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk membentuk masyarakat informasi. Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan kewenangan KI dalam menjangkau masyarakat pada tingkat basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Tantangan dari eksternal yang harus dihadapi KIP, antara lain mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan UU KIP, mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP, serta mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik. Lima tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan-kebijakan pelayanan publik seperti penyelenggaraan BPJS, BOS dan Undang-undang Desa. Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan masyarakat oleh KI untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan publik perlu lebih didorong. Tentu dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal. Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data ini juga merupakan peluang yang perlu direspon oleh KI. Termasuk komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti

Open Government Indonesia (OGI), Sustainable Development Goals (SDGs) dan Extractive Industries Transparency Initiative (IETI).

Dari berbagai tantangan yang telah disampaikan, maka arah strategis yang diambil ke depannya, terdiri dari 5 (lima) isu strategis yang hendak dikembangkan sebagai program prioritas, yaitu:

1. Kelembagaan Komisi Informasi, termasuk didalamnya tentang peningkatan kapasitas, pembentukan KI Provinsi, dan soal integritas;
2. Sistem penyelesaian sengketa informasi meliputi mekanisme dan sistem sengketa informasi serta kompilasi putusan;
3. Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memasifkan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat. Pengarusutamaan dilaksanakan pada isu-isu sektoral;
4. Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi KI dengan publik secara luas; dan;
5. Inovasi dan kolaborasi yaitu model-model kegiatan atau program baru yang dikembangkan oleh KI baik dilaksanakan oleh KI sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan para pihak di luar KI.

B.2.1 Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun rincian realisasi program Prioritas Nasional (PN) tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di Tahun Berjalan dengan anggaran sebesar Rp. 2.844.613.000,-.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner dibantu oleh Panitera yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan. Ruang lingkup yang dilaksanakan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun anggaran 2024 dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Reguler dan Tahapan Pemilu/Pemilihan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tugas utama Komisi Informasi adalah melakukan sidang sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik merupakan mekanisme yang diharapkan oleh

masyarakat selaku pemohon informasi publik untuk mendapatkan keadilan atas sengketa informasi yang dia ajukan. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat menjamin hak pemohon dan pemilik informasi publik dalam sebuah proses adjudikasi non litigasi. Selain itu, 2023-2024 merupakan Tahun Pemilu dimana Komisi Informasi Pusat diamanatkan melalui Perki 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk mengawal adanya Sengketa Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak. Selain itu, diharapkan pada tahun ini dapat terbentuk Forum Kehumasan KI Pusat dengan media untuk meningkatkan awareness dan concern media dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, dan secara khusus mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- b. Penyusunan Regulasi terkait dengan Sengketa Informasi Publik selain melakukan sidang sengketa informasi, Komisi Informasi juga memiliki fungsi mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaksanaan sengketa informasi publik dan layanan informasi publik oleh badan publik. Regulasi ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Informasi (Perki) yang berkekuatan hukum. Salah satunya adalah Regulasi untuk penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Sengketa Informasi Publik (SIMSI) secara Menyeluruh di seluruh Komisi Informasi di Indonesia yang sedang dikembangkan kembali pada tahun 2023 lalu.

Selain itu, Pada tahun ini akan disusun juga Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu juga, dilaksanakan Apresiasi Desa dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dan juga Review Kebijakan Publik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan tindak lanjut Kajian UU KIP yang sudah diselesaikan pada Tahun 2023.

- c. Peningkatan Kompetensi SDM dan Pendalaman Fungsi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi terus berusaha mengembangkan Kapasitas Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yaitu dengan melaksanakan Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Advokat untuk Komisioner KI Pusat dan SDM yang berlatar belakang 8 Hukum untuk mendukung Fungsi Komisi Informasi Pusat dalam Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi maupun Sidang lainnya dimana Komisi Informasi Pusat hadir selaku termohon/tergugat pada peradilan-peradilan lainnya.

- 2. Jumlah Badan Publik yang Informatif dengan anggaran sebesar Rp. 5.418.587.000,-.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari Ukonstitusi Negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” pada Badan Publik di Indonesia. Dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pengawasan komitmen Badan Publik dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya di lakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2024 menargetkan 130 Badan publik mendapatkan kualifikasi Informatif. Pada Tahun 2024, Komisi Informasi Pusat menargetkan untuk memfokuskan kepada Pembinaan Badan Publik yang masih mendapatkan predikat Kurang Informatif dan Tidak Informatif pada Monev KIP. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab KI Pusat bahwa target Monitoring dan Evaluasi bukanlah kontestasi, tetapi juga merupakan media untuk memeratakan implementasi UU KIP di seluruh Badan Publik. Metode yang dilaksanakan adalah dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PPID Badan Publik. Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga melakukan pendampingan kepada Badan Publik yang ingin concern terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh unsur-unsur Komisi Informasi. Selain Penguatan terhadap Badan Publik yang Kurang Informatif dan Tidak Informatif, Komisi Informasi Pusat juga melakukan inisiasi dan penjajakan untuk mengikutsertakan Penilaian Monitoring dan Evaluasi untuk menjadi salah satu

sub penilaian yang diakui oleh Kementerian PANRB dalam penilaian nilai Reformasi Birokrasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Hal ini menjadi salah satu upaya Komisi Informasi agar Badan Publik lebih concern lagi terhadap pentingnya Implementasi UU KIP.

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 7.018.124.000,-.

Dalam rangka mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 D tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan masyarakat di tingkat daerah dan nasional dan sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP). Penyusunan IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi UU KIP di 34 provinsi se-Indonesia. Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). Ketiga aspek tersebut dinilai melalui 3 (tiga) dimensi yaitu : Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Hukum yang diturunkan kedalam 20 (dua puluh) indikator dan diturunkan kedalam 85 (delapan

puluh lima) pertanyaan. Maksud dari penyusunan IKIP adalah untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah se-*nasional*, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2024 berada pada nilai 76. Hasil IKIP yang optimal tidak terlepas dari pemahaman Informan Ahli Daerah terhadap pekerjaan dalam kuesioner & data fakta yang tersaji oleh Kelompok Kerja Daerah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di daerahnya masing-masing.

B.2.2 Pengungkapan Capaian Output Strategis pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Selama tahun 2024, output strategis yang dicapai oleh Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pada Output Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di tahun berjalan terdapat realisasi sebesar Rp. 2.544.331.616,- atau sebesar 88,20% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.884.613.000,-. Adapun atas output tersebut realisasi selama tahun 2024 yaitu diselesaiannya sengketa informasi sebanyak 129 sengketa dengan target tahun 2024 sebanyak 110 sengketa yang diselesaikan.
2. Pada Output Jumlah Badan Publik yang Informatif terdapat realisasi sebesar Rp. 4.950.703.541,- atau sebesar 91,37% dari pagu anggaran sebesar Rp 5.418.587.000,- dengan target sebesar 130 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif . Adapun capaian tahun 2024 yaitu 162 Badan Publik masuk kedalam kategori informatif.
3. Pada Output Indeks Keterbukaan Informasi Publik terdapat realisasi sebesar Rp. 6.724.133.042,- atau sebesar 95,81% dari pagu anggaran sebesar Rp 7.018.124.000,- dengan target nilai sebesar 76. Adapun atas output tersebut capaian IKIP tahun 2024 yaitu sebesar 75,65 atau berada pada kategori Sedang. Nilai IKIP tahun 2024 naik sebesar 0,25 point dari tahun 2023 sebesar 75,40 namun memang secara realisasi masih belum dapat memenuhi target 76. Hal ini disebabkan pada tahun ini terjadi penurunan pada nilai indeks pada dimensi hukum. Sedangkan pada 2 dimensi lainnya (dimensi politik dan ekonomi) naik tetapi tidak signifikan.

B.2.3 Pengungkapan Capaian Output per Fungsi

APBN

Capaian output utama per fungsi APBN pada satuan kerja Komisi Informasi Pusat adalah pada Fungsi Ekonomi (04), sebagaimana dirincikan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

B.3 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 10.771.537,00 atau mencapai 0 persen karena tidak ada anggaran pendapatan. Pendapatan Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

:
*Realisasi
Pendapatan
Rp154.291.735*

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan	-	10.439.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		332.537	
Jumlah	-	10.771.537	-

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami sebesar sebesar 93,02 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kebutuhan belanja modal, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, serta Tidak ada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.439.000	13.999.999	-25,44
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	332.537	129.960.640	-99,74
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		10.331.096	-100,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	10.771.537	154.291.735	-93,02

Realisasi Belanja

Negara

Rp42.347.206.904

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 42.347.206.904,00 atau 94,91% dari anggaran belanja sebesar Rp44.616.464,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.444.881.000	6.104.745.365	94,72
Belanja Barang	37.261.083.000	35.331.962.179	94,82
Belanja Modal	910.500.000	910.499.360	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	44.616.464.000	42.347.206.904	94,91
Pengembalian		-	-
Jumlah	44.616.464.000	42.347.206.904	94,91

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami secara nominal mengalami peningkatan namun secara persentase mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat tambahan Program Prioritas Nasional pada tahun 2024 dan Pemblokiran Perjalanan Dinas sebesar 50% berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah - Langkah

Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga. Surat tersebut memerintahkan agar K/L meneliti kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga Efektivitas Pencapaian Target.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.104.745.365	5.469.452.879	11,62
Belanja Barang	35.331.962.179	32.141.982.036	9,92
Belanja Modal	910.499.360	933.768.000	(2,49)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	42.347.206.904	38.545.202.915	9,86

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp6.104.745.36

5

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.104.745.365,00. dan Rp5.816.476.386 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,96 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan pangkat, dan kenaikan golongan serta adanya Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut;

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.341.639.720	1.435.884.290	(6,56)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	104.330.150		
Belanja Honorarium	2.670.552.852	2.594.320.700	2,94
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus / Kegiatan	1.988.223.597	1.786.271.900	11,31
Jumlah Belanja Kotor	6.104.746.319	5.816.476.890	4,96
Pengembalian Belanja Pegawai	(954)	(504)	89,29
Jumlah Belanja	6.104.745.365	5.816.476.386	4,96

Belanja Barang

Rp35.331.962.179

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.331.962.179 dan Rp32.141.982.036. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,92 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini terjadi karena terdapat pelaksanaan kegiatan prioritas Komisi Informasi Pusat yaitu terdapat pengadaan sarana dan prasarana Ruang Aula, perluasan cakupan sewa ruangan di Gedung Wisma BSG, dan pelaksanaan program prioritas Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri. Adapun rincian belanja barang adalah sebagai berikut;

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.661.071.759	4.336.231.706	7,49
Belanja Barang Non Operasional	1.992.809.621	2.475.734.048	(19,51)
Belanja Barang Operasional - COVID 19	0	89.630.461	
Belanja Barang Non Operasional - COVID 19	0	0	
Belanja Jasa	13.549.345.895	10.620.672.494	27,58
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	-	-	
Belanja Pemeliharaan	635.757.642	583.875.576	8,89
Belanja Barang Persediaan	778.355.500	639.850.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.634.681.793	12.693.830.917	(0,47)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.084.539.969	709.252.898	52,91
Jumlah Belanja Kotor	35.336.562.179	32.149.078.100	9,91%
Pengembalian Belanja	(4.600.000)	(7.096.064)	
Jumlah Belanja	35.331.962.179	32.141.982.036	9,92%

Belanja Modal

Rp910.499.360

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp910.499.360,00 dan Rp933.768.000,00 dan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 2,49% pesen dibandingkan TA 2023 hal ini terjadi karena kebutuhan belanja modalnya tidak sebanyak tahun lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	910.499.360	933.768.000	(2,49)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	910.499.360	933.768.000	(2,49)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	910.499.360	933.768.000	-2,49

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rekening 032901002931306	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp
1.922.620*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.922.620,00 dan Rp 332.537,00. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

Jenis	Th 2024	Th 2023
Pot.Kehadiran Tunkin bln Des	239.620	254.537
Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bln Des	1.683.000	78.000
	-	-
Jumlah	1.922.620	332.537

C.3 Persediaan

Persediaan

Rp371.516.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp371.516.000 dan Rp289.672.200.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	371.516.000	289.672.200
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	371.516.000	289.672.200

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan

Mesin

*Rp6.101.624.008,
00*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp6.101.624.008 dan Rp5.423.458.589. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:	
Penggunaan kembali	0
Pembelian	921.761.560
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	243.596.141
Saldo per 30 Juni 2024	6.101.624.008
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-4.174.183.223
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.927.440.785

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

1. Pembelian 1 unit Lemari Kayu senilai Rp36.000.000;
2. Pembelian 6 unit Filling Cabinet Kayu senilai Rp45.200.000;
3. Pembelian 20 unit CCTV senilai Rp45.370.000;
4. Pembelian 1 Unit LCD Projector/Infocus senilai Rp5.375.000;
5. Pembelian 7 Unit Meja Kerja Kayu senilai Rp92.007.200;
6. Pembelian 50 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp127.690.000;
7. Pembelian 4 unit Sice senilai Rp16.000.000,00;
8. Pembelian 1 unit Bangku Panjang Kayu senilai Rp15.800.000,00;
9. Pembelian 7 unit Meja Rapat senilai Rp29.800.000;
10. Pembelian 4 unit Meja Makan Kayu senilai Rp17.000.000;
11. Pembelian 1 unit Backdrop TV/Wardrobe senilai Rp58.230.000;
12. Pembelian 7 unit Meja Taman senilai Rp13.050.000;

13. Pembelian 1 unit Meja TV senilai Rp4.000.000;
14. Pembelian 3 unit A.C. Split senilai Rp48.000.000;
15. Pembelian 1 unit Kitchen Set senilai Rp12.500.000;
16. Pembelian 2 unit Televisi senilai Rp6.918.300;
17. Pembelian 2 unit Dispenser senilai Rp5.780.050;
18. Pembelian Mimbar/Podium senilai Rp4.500.000,00;
19. Pembelian 2 unit Microphone/Wireless Mic senilai Rp27.726.000;
20. Pembelian 2 unit Mixer Sound Sistem senilai Rp19.791.200;
21. Pembelian 1 unit Lensa Camera senilai Rp12.758.100;
22. Pembelian 4 Unit LCD Monitor senilai Rp144.608.500;
23. Pembeian 2 unit Camera Conference senilai Rp18.227.200;
24. Pembelian 5 unit Note Book senilai Rp97.500.000;
25. Pembelian 1 unit Speaker Komputer senilai Rp11.029.200.
26. Pembelian 1 unit Printer senilai Rp6.900.810.

Proses henti guna peralatan dan mesin, antara lain :

1. Dalam proses lelang 5 unit Filing Cabinet Besi senilai Rp7.537.500;
2. Dalam Proses lelang 10 unit CCTV senilai Rp37.300.000;
3. Dalam proses lelang 5 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp49.075.010;
4. Dalam proses lelang 31 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp38.721.831;
5. Dalam proses lelang 1 unit Meja Rapat senilai Rp7.200.000;

6. Dalam proses lelang 10 unit Note Book senilai Rp100.036.800;
7. Dalam proses lelang 2 unit Printer senilai Rp2.400.000;
8. Dalam proses lelang 1 unit External/Portable Hardisk senilai Rp1.325.000,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp49.473.000

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp49.473.000 dan Rp49.473.000. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan Aset Tetap Lainnya. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	49.473.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	49.473.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	49.473.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp4.174.183.233

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp4.174.183.233 dan Rp3.604.604.671. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.101.624.008	4.174.183.223	1.927.440.785
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		6.101.624.008	4.174.183.223	1.927.440.785

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Pada TA 2023 Sekretariat KIP melakukan proses rangkaian penghapusan dengan aksi fitur website SAKTI henti guna dan mengajukan permohonan penghapusan oleh sebab-sebab lain. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain

C.8 Aset Lain-Lain

Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah Rp 195.218.620 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- Penghentian penggunaan	-
- Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	-
- Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-
Mutasi kurang:	
- penghapusan BMN	-

Saldo per 31 Desember 2024	-
-----------------------------------	---

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai

perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing 0 dan Rp195.218.620. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			0
Software	0	0	0
Jumlah	0		0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp

41.274.526,00

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 41.274.526,00 dan Rp 41.939.026,00. Utang kepada Pihak Ketiga terbentuk dari Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pembayaran BBM Kendaraan Dinas dan Belanja Operasional. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan KKP Pemakaian BBM Bln Des 2024	40.917.412	
Tagihan KKP Belanja Operasional Bln Des 2024	357.114,00	
Total	41.274.526	

Ekuitas

Rp2.309.077,8

79

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.309.077,879 dan Rp2.116.392.629. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp0,00

D.PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2024 dan 2023 Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat Pendapatan Jasa maupun Pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023.

*Beban
Pegawai
Rp6.102.822.
745*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.102.822.745 dan Rp5.631.554.057. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai sebesar 10,03%. Kenaikan Beban Pegawai ini disebabkan adanya penambahan 2 pegawai PPPK dan Kenaikan Gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil. Adapun rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	985.524.000	913.645.640	7,87
Beban Gaji PPPK	76.886.400	0	
Beban Tunjangan-tunjangan PNS	354.537.216	337.570.354	5,03
Beban Tunjangan-tunjangan PPPK	27.338.300		
Beban Honorarium	2.670.552.852	2.594.320.700	2,94
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan)	1.880.621.622	1.786.017.363	5,30
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan) PPP	107.362.355		
Jumlah	6.102.822.745	5.631.554.057	8,37

*Beban
Persediaan
Rp696.511.700
00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp696.511.700 dan Rp481.399.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	696.511.700	481.399.900	44,68
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	696.511.700	481.399.900	44,68

*Beban
Barang dan
Jasa Rp*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.158.775.383 dan

20.158.775.3 Rp17.562.982.715. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	4.492.896.617	4.172.954.662	7,67
Beban Jasa Pos dan Giro	20.088.250	16.175.050	24,19
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107.730.000	187.816.000	(42,64)
Beban Barang Operasional - Penanganan COVID - 19		89.630.461	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	256.956.000	491.012.013	(47,67)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan COVID - 19	0	0	
Beban Bahan	1.505.703.621	1.699.012.035	(11,38)
Beban Honor Output Kegiatan	230.150.000	285.710.000	(19,45)
Beban Langganan Telepon	5.225.378		
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	201.026.520	206.032.773	(2,43)
Beban Sewa	8.114.957.385	6.821.061.441	18,97
Beban Jasa Konsultan	450.930.000	285.231.780	58,09
Beban Jasa Profesi	2.539.501.400	2.557.082.500	(0,69)
Beban Jasa Lainnya	2.233.610.212	751.264.000	197,31
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	0	0	
Jumlah	20.158.775.383	15.679.375.501	28,57

Beban Pemeliharaan Rp675.450.034

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp675.450.034 dan Rp583.050.944. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	675.450.034	583.050.944	15,85
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	0	-
Jumlah	675.450.034	583.050.944	-15,85%

Beban

*Perjalanan
Dinas*

Rp13.718.716.762

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.718.716.762 dan Rp13.398.037.403. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terdapat kenaikan sebesar 2,39 persen karena adanya pelaksanaan program prioritas yang terlaksana dengan baik dan meningkatnya urgensi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	772.838.774	1.190.289.596	-35,07
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	256.767.000	156.800.000	63,75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.225.944.099	1.745.359.367	27,54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.378.626.920	9.596.335.542	-2,27
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	1.084.539.969	709.252.898	52,91
Jumlah	13.718.716.762	13.398.037.403	2,39%

Beban

*Penyusutan
dan
Amortisasi*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 801.912.493 dan Rp692.031.316 Beban Penyusutan

Rp801.912.4

93

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Tidak ada Beban Amortisasi pada tahun 2024 karena Software yang dimiliki sudah habis masa manfaatnya. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan
2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	801.912.493	692.031.316	15,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	801.912.493	692.031.316	15,88
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	801.912.493	692.031.316	15,88%

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp10.439.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.439.000	13.999.999	-0,25
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	140.291.736	-1,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	10.439.000	154.291.735	-93,23%

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
	0	0	-
	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp2.116.392.629

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.116.392.629 dan Rp1.573.222.542.

Defisit LO

Rp42.143.750.17

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 Rp42.143.750.117 dan Rp38.194.764.600. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap non Revaluasi	-
Aset lainnya non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

<i>Transaksi</i>	E.4 Transaksi Antar Entitas
<i>Antar Entitas</i>	Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 42.336.435.367. dan Rp38.737.934.687.
<i>Rp42.336.435.367</i>	Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10.771.537)
Ditagihkan ke Entitas Lain	42.347.206.904
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	42.336.435.367

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp10.771.537 sedangkan DKEL sebesar Rp42.347.206.904

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan		Rp	-
Pengesahan Pengembalian Hibah		Rp	-
Jumlah		Rp	-

Ekuitas

Akhir

**Rp2.309.077.879
7.879**

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.309.077.879 dan Rp2.116.392.629

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada TA Semester I 2024 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat penambahan 2 pegawai PPPK dari penerimaan CASN Kementerian Kominfo Tahun 2023. Pegawai tersebut menempati Jabatan sebagai Arsiparis Ahli Pertama dan Pranata Humas Ahli Muda
- Terdapat kenaikan Gaji ASN sebesar 8% pada Bulan Maret 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- Terdapat realisasi pengadaan sarana dan prasarana Aula di Gedung Wisma BSG untuk menunjang program Komisi Informasi Pusat.
- Terdapat realisasi program pemantauan pemilu yang dilaksanakan di Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam rangka melakukan pemantauan terhadap keterbukaan informasi pemilu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Luar Negeri antara lain: Australia, Arab Saudi, Hongkong, Jepang, Malaysia, dan di Dalam Negeri antara lain: Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.
- Terlaksananya FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi sebagai salah satu cara pengukuran IKIP. Tiga pendekatan yang digunakan dalam pengukuran IKIP adalah lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Pemilihan Informan Ahli menggunakan pendekatan pentahelix, yang terdiri dari 2 wakil Pemerintah, 2 wakil dunia usaha, 2 wakil Masyarakat, 2 wakil akademisi, dan 2 wakil media.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (677382) SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 5:31 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,116,392,629	1,573,222,542	543,170,087	34.53
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42,143,750,117)	(38,194,764,600)	(3,948,985,517)	10.34
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42,336,435,367	38,737,934,687	3,598,500,680	9.29
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	192,685,250	543,170,087	(350,484,837)	(64.53)
EKUITAS AKHIR	2,309,077,879	2,116,392,629	192,685,250	9.1

Keterangan :

Jakarta, 7 Mei 2025

FINAL

A.n Penanggung Jawab

UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

Plh Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bernard Yuari Putranto S.Hum, M.Si

NIP. 198303032008031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 059

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT 677382

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 5:34 PM

Halaman :

lap_lra_face_satker_new_poc

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 059

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT 677382

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 5:34 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024					2023				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	44,616,464,000	42,347,206,904	(2,269,257,096)	94.91	39,781,282,000	38,892,226,422	(889,055,578)	97.77		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :

Jakarta, 7 Mei 2025

FINAL

A.n Penanggung Jawab

UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

Plh Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bernard Yuari Putranto S.Hum, M.Si

NIP. 198303032008031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (677382) SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 5:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,922,620	332,537	1,590,083	478.17
Persediaan	371,516,000	289,672,200	81,843,800	28.25
JUMLAH ASSET LANCAR	373,438,620	290,004,737	83,433,883	28.77
ASSET TETAP				
Peralatan dan Mesin	6,101,624,008	5,423,458,589	678,165,419	12.50
Aset Tetap Lainnya	49,473,000	49,473,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,174,183,223)	(3,604,604,671)	(569,578,552)	15.80
JUMLAH ASSET TETAP	1,976,913,785	1,868,326,918	108,586,867	5.81
ASSET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	195,218,620	(195,218,620)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASSET LAINNYA	0	(195,218,620)	195,218,620	(100.00)
JUMLAH ASSET LAINNYA	0	0	0	0
JUMLAH ASET	2,350,352,405	2,158,331,655	192,020,750	8.90
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	41,274,526	41,939,026	(664,500)	(1.58)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41,274,526	41,939,026	(664,500)	(1.58)
JUMLAH KEWAJIBAN	41,274,526	41,939,026	(664,500)	(1.58)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,309,077,879	2,116,392,629	192,685,250	9.10
JUMLAH EKUITAS	2,309,077,879	2,116,392,629	192,685,250	9.10
JUMLAH EKUITAS	2,309,077,879	2,116,392,629	192,685,250	9.10
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,350,352,405	2,158,331,655	192,020,750	8.90

Keterangan :

Jakarta, 7 Mei 2025

FINAL

A.n Penanggung Jawab

UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

Plh Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bernard Yuari Putranto S.Hum, M.Si

NIP. 198303032008031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (677382) SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:29 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	6,102,822,745	5,631,554,057	471,268,688	8.368
Beban Persediaan	696,511,700	481,399,900	215,111,800	44.685
Beban Barang dan Jasa	20,158,775,383	17,562,982,715	2,595,792,668	14.78
Beban Pemeliharaan	675,450,034	583,050,944	92,399,090	15.848
Beban Perjalanan Dinas	13,718,716,762	13,398,037,403	320,679,359	2.393
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pernda	0	0	0	0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (677382) SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 2:22 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:29 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	801,912,493	692,031,316	109,881,177	15.878
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	42,154,189,117	38,349,056,335	3,805,132,782	9.922
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,154,189,117)	(38,349,056,335)	(3,805,132,782)	9.922
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	10,439,000	13,999,999	(3,560,999)	(25.436)
Pendapatan Pelepasan Aset	10,439,000	13,999,999	(3,560,999)	(25.436)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	140,291,736	(140,291,736)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	140,291,736	(140,291,736)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	10,439,000	154,291,735	(143,852,735)	(93.234)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(42,143,750,117)	(38,194,764,600)	(3,948,985,517)	10.339
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(42,143,750,117)	(38,194,764,600)	(3,948,985,517)	10.339

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 7 Mei 2025

A.n Penanggung Jawab

UAKPA Kuasa Pengguna Anggaran

Plh Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Bernard Yuari Putranto S.Hum, M.Si

NIP. 198303032008031001



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Gedung Wisma BSG Lt.9 Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 <http://komisiinformasi.go.id/>

NOTA DINAS

Nomor: 82/Set.KIP.31/PL.06.06/05/2025

Kepada Yth : Kepala Biro Umum
Dari : Plh. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Hal : Penyampaian Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
(CAL BMN) Sekretariat KIP TA 2024 Audited
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Mei 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode anggaran Tahun 2024, maka dengan hormat kami sampaikan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CAL BMN) TA 2023 Audited, bersama ini kami sampaikan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dan data-data pendukung lainnya, antara lain:

1. Laporan Neraca (saldo awal dan saldo Triwulan III); Laporan Barang Persediaan;
2. Laporan Barang Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan); Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. Laporan Aset Tak Berwujud; Laporan Barang Bersejarah;
4. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola
5. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada
6. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
8. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal data BMN antara UAKPB dan UAKPA;
9. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Bernard Yuari Putranto

Tembusan:

Kepala Biro Keuangan dan BMN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

2024 CALK BMN AUDITED

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara." Ini adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan lebih rinci mengenai barang milik negara (BMN) yang tercantum dalam laporan BMN.

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan yang dalam hal pelaporan penatausahaan ini adalah Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN) Tahun Anggaran 2024 Unaudited

Penyusunan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022 Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Informasi-informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan Laporan BMN ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Komisi Informasi Pusat dalam hal penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

Jakarta, 07 Mei 2025

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
4. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	
4.1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal	
4.2. Laporan Posisi BMN di Neraca Saldo Awal	
4.3. Laporan Posisi BMN di Neraca Tahun 2024	
4.4. Laporan Barang Persediaan	
4.5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel	
4.6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel	
4.7. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan	
4.8. Laporan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	
4.9. Laporan Aset Tak Berwujud	
4.10. Laporan Barang Bersejarah	
4.11. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	
4.12. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	
4.13. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	
4.14. Laporan Barang Hibah DK/TP	
4.15. Laporan PNBP yang Bersumber dari Pengelolaan BMN	
5. CATATAN ATAS LAPORAN BMN	1

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA
PENGGUNA BARANG KOMISI INFORMASI PUSAT**

Laporan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Informasi Pusat yang terdiri atas: Neraca; Laporan Barang Persediaan; Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan); Laporan Konstruksi Dalam Pengerajan (KDP); Laporan Aset Tak Berwujud; Laporan Amortisasi Software; Laporan Penyusutan; Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang; Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang; Laporan Barang Bersejarah, Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal, Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan BMN tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi BMN secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 07 Mei 2025

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. GAMBARAN UMUM

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 didasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun lingkup penerapan atas pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan melalui pelaporan BMN. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

- sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;^{1. Peraturan....}
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
 - u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020;
 - v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 

- w. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- x. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- y. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2012 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- z. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyeragaman Satuan Pencatatan Barang Persediaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

III. ENTITAS PELAPORAN

Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, dan kebawah adalah Fungsional. Selain PNS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat KIP juga didukung oleh staf profesional non PNS, yang direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KIP. staf profesional non PNS antara lain adalah tenaga ahli, asisten ahli, sekretaris komisioner dan staf sekretariat..

Adapun struktur organisasi kesekretariatan pada Komisi Informasi Pusat Pusat sebagaimana Gambar (1.1).



(Gambar I.1: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat)

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Misi

“Meningkatkan Kesadaran yang kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Menguatkan kelembagaan komisi Informasi melalui konsolidasi, publik dan pemdalaman wawasan serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan

Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju indonesia cerdas dan sejahtera.

Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik”

IV. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan Umum

Laporan Barang Milik Negara Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa peraturan teknis dalam penatausahaan Barang Milik Negara antara lain mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, Bagan Akun Standar (BAS), nilai kapitalisasi aset tetap, rekonsiliasi, dan kebijakan penyusutan dan/atau amortisasi Barang Milik Negara.

A. Penggolongan dan kodefikasi BMN

Penggolongan dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan dan kodefikasi BMN yang berlaku. Pada pembukuan BMN, barang dapat diklasifikasikan ke dalam: golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan/atau fungsinya. Tata cara penggolongan dan kodefikasi BMN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi

Penentuan nilai kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana pasal 40. Nilai satuan minimum Kapitalisasi BMN adalah sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin. Sedangkan untuk gedung dan bangunan serta aset tetap renovasi gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengakibatkan Buku Barang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Buku Barang Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
2. Buku Barang Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

C. Rekonsiliasi

Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga.

D. Penyusutan dan Amortisasi BMN

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan PMK-90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK-01/PMK.06/2014, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan BMN, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2014PMK No 1 tahun 2013 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Sedangkan untuk amortisasi BMN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Metode Penilaian Persediaan

Sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, terdapat perubahan metode penilaian persediaan dari Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi *First-In First-Out* (FIFO) yang mulai diterapkan pada tahun 2021.

V. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp6,151,339,008,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 5,668,392,209,- dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,165,357,701,- untuk mutasi masuk dan Rp. 682,410,902,- untuk mutasi keluar. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai

alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- a. Neraca (saldo awal dan saldo Semester II);
- b. Laporan Barang Persediaan;
- c. Laporan Barang Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- d. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- e. Laporan Aset Tak Berwujud;
- f. Laporan Barang Bersejarah;
- g. Laporan Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
- h. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- i. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- j. Laporan Barang Hibah DK/TP
- k. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- l. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- m. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan (*Opname*) TA 2023;
- n. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal data BMN antara UAKPB dan UAKPA;
- o. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN.

VI. LAPORAN BARANG

1. PERALATAN DAN MESIN (131311)

Saldo nilai perolehan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6,101,624,008,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp.5,423,458,589,- mutasi masuk dengan nilai Rp. 921,761,560,- dan mutasi keluar dengan nilai Rp. 243,596,141,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Intrakomptabel (Rp.)	Ekstrakomptabel (Rp.)
A. Saldo nilai perolehan per 01 Januari 2024		5,423,458,589	242,000
Mutasi Masuk			
-	Penambahan Saldo Awal	11,262,200	0
-	Pembelian	910,499,360	0
-	Transfer Masuk	0	0
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0	0

-	Pembatalan Penghapusan	0	0
-	Reklasifikasi Masuk	0	0
-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	0
-	Pengembangan Nilai Aset	0	0
-	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	0
-	Aset tetap yang tidak digunakan		0
B.	Total Nilai Mutasi Masuk	921,761,560	0
Mutasi Keluar			
-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	0
-	Pencatatan yang mau dihapuskan	0	0
-	Penghapusan	0	0
-	Penghentian Aset Dari Penggunaan	243596141	0
-	Reklasifikasi Keluar	0	0
-	Koreksi Pencatatan	0	0
-	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola		0
C.	Total Nilai Mutasi Keluar	243596141	0
D.	Saldo Nilai Peralatan Mesin Per 31 Des 2024 (A+B-C)	6,101,624,008	242,000

2. ASET TETAP DALAM RENOVASI (135111)

Saldo Aset tetap dalam Renovasi pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 0,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp. 0,- dan tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

3. ASET TETAP LAINNYA (135121)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp.49,473,000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp. 49,473,000,- dan tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

4. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.371,516,200,- yang terdiri dari:

Jenis Persediaan	Nilai (Rp.)
Barang Konsumsi	371,516,200
Bahan untuk Pemeliharaan	0
Suku Cadang	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
Bahan Baku	0
Persediaan Lainnya	0
Total	371,516,200

Nilai saldo persediaan tersebut per tahun 2022 disajikan dengan menggunakan metode *First-In First-out* (FIFO) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

5. SOFTWARE (153151)

Saldo nilai perolehan *Software* pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai perolehan Rp.0,- pada tahun 2024 dan tidak terdapat mutasi masuk namun terdapat mutasi keluar sebesar mutasi keluar.

6. ASET TAK BERWUJUD LAINNYA (153191)

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud Lainnya pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp. 0,- dan tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

7. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp. 195,218,620,- mutasi tambah senilai Rp. 243,596,141,- dan mutasi kurang senilai Rp. 438,814,761,-. Adapun mutasi keluar tersebut adalah Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola yang merupakan BMN dengan nilai perolehan di bawah Rp. 100.000.000,-.

8. ASET TETAP TAK BERWUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

Saldo Asset Tetap Tak Wujud yang tidak digunakan dalam oprasional pemerintah pada sekretariat Komisi Informasi Pusat TA 2024 sebesar Rp.0 - jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0,- di Tahun 2024, Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai perolehan Rp. 0,- pada tahun 2024.



9. BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN ANGGARAN 2024

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN per akun neraca pada Laporan Barang Milik Negara pada Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 6,522,855,208,- Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya beserta dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut (dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi):

No .	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	371,516,200	100,00%	0	0,00%	371,516,200	100,00%
	Subjumlah (I)	371,516,200	100,00%	0	0,00%	371,516,200	100,00%
II	Aset Tetap						
	Tanah	0	0,00%	0		0	0,00%
	Peralatan	6,101,624,008	100%	242,000	0%	6,101,866,008	100,00%
	Gedung dan Bangunan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jalanan, Irigasi, dan Jembatan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jaringan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset Tetap Lainnya	49,473,000	100,00%	0	0,00%	49,473,000	100,00%
	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Subjumlah (II)	6,151,097,008	99,60%	242,000	0,40%	6,151,339,008	100,00%
III	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Software	0	0	0	0,00%	0	100,00%
	Aset tak berwujud lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Amortisasi Software	0	100,00%	0	0,00%	0	100,00%
	Aset lainnya yang dihentikan penggunaannya dari operasional	0	100%	0	0,00%	0	0,00%
	Subjumlah (III)	0	100,00%	0	0,00%	0	100,00%
Total		6,522,613,208	99,63%	242,000	0,37%	6,522,855,208	100,00%

VII. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS TAHUNAN 2022-2023

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023, terdapat/tidak terdapat* temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud. Rincian Tindak Lanjut Temuan

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada Komisi Informasi Pusat sebagaimana terlampir.

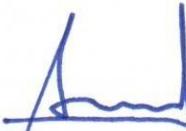
**REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2024**
Pada Komisi Informasi Pusat
Per 31 Desember 2023

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
--	--	--

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023**
Pada Komisi Informasi Pusat
Per 30 Juni 2023

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
--	--	--

Jakarta, 07 Mei 2025
A.n Plh.Sekretaris Komisi Informasi Pusat,


Bernard Yuari Putrato
NIP.: 198303032008031001

UAPB : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAPPB-E1 : SEKRETARIAT JENDERAL
UAPPB-W : SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

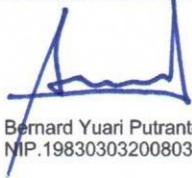
LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 07-05-2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
KODE UAKPB : 059.01.0199.677382.000.KP

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	371,516,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
	Jumlah	371,516,000

Disetujui tanggal : 07-05-2025
Kuasa Pengguna Barang

A.n.Plh.Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Bernard Yuari Putranto
NIP.198303032008031001

Jakarta, 07-05-2025
Petugas Pengelola Persediaan



Rizki Susanto
NIP.-

UAPB : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 UAPPB-E1 : SEKRETARIAT JENDERAL
 UAPPB-W : SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,662,000
000008	Spidol Kecil	0
000038	Ballpoint	170,000
000040	Rautan Meja	0
000041	Balliner Biru	3,416,000
000042	Spidol White Board Hitam	300,000
000043	Spidol White Board Merah	0
000044	Spidol White Board Biru	330,000
000045	Spidol Permanent Merah	132,000
000046	Spidol Permanent Biru	165,000
000047	Spidol Permenent Hitam	77,000
000050	Spidol Kecil Biru	0
000051	Buku Ekspedisi 100	0
000052	Pensil Mekanik	0
000053	Balliner Hitam	0
000054	Spidol Art Line 70	0
000055	Stabilo Boss	72,000
000056	Balliner Biru G Putih	0
1010301003	Penjepit Kertas	759,000
000002	Binder Clip No.260	292,000
000003	Binder Clip No.200	284,000
000010	Paper Clip	0
000016	Binder Clip No.105	138,000
000017	Pembuka Staples	0
000032	Stapler 10HD	0
000037	Binder Clip Joyco No.107	0
000038	Binder Clip Joyco No.200	0
000039	Binder Clip Joyco No.260	0
000040	PAPER CLIP	45,000
1010301004	Penghapus/Korektor	246,000
000007	Setip 30 JK Putih	0
000011	Type EX	221,000
000012	Type EX Roll	0
000013	Type X Cair	0
000015	Penghapus Pensil BOXY	0
000016	PENGHAPUS PENSIL	25,000
1010301005	Buku Tulis	40,000
000013	Buku Folio isi 300	0
000016	Buku Kuitansi	40,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,821,000
000003	Bindex Ordner	192,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000007	Box File Arsip Bindex Besar	429,000
000023	Map Biru Kominfo	0
000028	Plastik File PP Pocket A4 No.2040	1,200,000
000029	Expanding File Folio Bantex	0
000031	MAP PLASTIK	0
1010301007	Penggaris	112,000
000003	Penggaris Besi 30 cm	0
000005	Penggaris Mika 30 CM	112,000
000006	Penggaris Besi 50 CM	0
000007	Penggaris Besi 100 CM	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	167,200
000003	Cutter L.500	167,200
000005	Gunting	0
000010	Cutter Joykon A 300	0
000012	Cutter L-500 Blister Kenko	0
1010301010	Alat Perekat	1,132,500
000013	Lem Stick	341,000
000018	Doubletape 1 2 "	0
000021	Double Tipe 1	0
000022	Lem Stik S	0
000024	Double Tape 3M 2 Inci Scotch Mouting	0
000026	Double Tape HG 1 Inch	0
000027	Lem Stick Kecil	0
000028	LAKBAN HITAM 2 INCI	294,000
000029	LAKBAN BENING 2 INCI	297,500
000030	Double Tape	0
000031	Post It Sign Here	80,000
000032	Kertas Post IT__	0
000033	Selotip Kecil	120,000
1010301012	Staples	1,470,000
000001	Staples HD10	558,000
000003	Staples HD 10 Max	0
000004	Stapler HD 30 Staples Besar	912,000
1010301013	Isi Staples	165,000
000001	Isi Staples HD No.10	35,000
000002	Isi Staples HD No. 3	130,000
1010301014	Barang Cetakan	278,898,000
000002	Buku Peraturan Komisi Informasi No.1 Th 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	0
000013	Paper Bag	0
000039	Buku Keterbukaan Informasi Publik Berputar 180 derajat	0
000040	Buku Peraturan Komisi Informasi No.1 Th 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	0
000048	PLAKAT KI PUSAT	10,795,000
000073	Buku Modul AJUDIKASI	0
000075	Buku Modul MEDIASI	0
000082	Buku Perki 1-5 2016	Buku Perki
		0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
	1 s d 5 Tahun 2016	
000083	Amplop Putih Besar Logo KOMINFO	0
000101	Buku Perki 1 Tahun 2019 Tentan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu	1,440,000
000102	Buku Perki Slip Desa	855,000
000107	Amplop Putih Garuda 23 Cm x 11 CM	0
000109	Buku Pedoman Teknis PP PSI	0
000110	Amplop Putih Garuda Ukuran Folio	0
000111	Amplop Putih Sekretariat KIP Ukuran Folio	0
000113	Buku Pedoman Tata Naskah Dinas KI Pusat	0
000116	Paper Bag KIP Tahun 2021	0
000119	Map Putih KI Pusat Garuda Emas	0
000120	Buku UU Keterbukaan Informasi Publik	3,520,000
000123	KOP Surat Garuda Ukuran F4 Emas Tengah	0
000125	Goodiebag Jahit KIP Warna Pink	0
000127	Goodiebag Jahit KIP Warna Biru Langit	0
000128	Buku Perki I Tahun 2021 tentang SLIP	6,270,000
000129	MAP SEKRETARIAT KI PUSAT/KOMINFO	0
000130	MAP KOMISI INFORMASI PUSAT	11,205,000
000131	Goody Bag Sasi Saki 2 sisi	0
000132	Amplop Besar Logo Garuda KIP	4,387,500
000133	Buku Perki I Tahun 2021 SLIP_Glossy	0
000134	Kalender Meja KI Pusat 2023	0
000135	Buku Agenda Kerja KI Pusat 2023	0
000136	kalender Meja 2024	0
000137	Goody Bag Bahan Drill	32,065,000
000138	Map Kepegawain Rahasia	3,200,000
000139	Buku Perki No.1/2024 SOTK KI	9,500,000
000140	Buku Agenda Kerja KI Pusat	20,790,000
000141	Buku Sejarah KI	19,500,000
000142	Kalender Meja KI Pusat Tahun 2025	32,120,500
000143	Buku Memahami Sengketa Informasi Publik	42,250,000
000144	Buku tentang Keterbukaan Informasi Publik	39,500,000
000145	Buku Pilkada	41,500,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	690,000
000010	Pembolong Kertas	0
000027	Gunting	20,000
000036	Post It Warna	0
000037	Bak Stample No.2 Kenko	0
000038	Pembolong Kertas Besar	520,000
000039	Dispenser Isolasi	150,000
1010302001	Kertas HVS	4,940,000
000012	Kertas HVS A4 Paper One 75 Gr	2,850,000
000013	Kertas HVS F4 Paper One 75 Gr	2,090,000
000014	Kertas HVS A4 PO 75 Gr	0
000015	Kertas HVS F4 PO 75 Gr	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
1010302002	Berbagai Kertas	650,000
000002	Kertas Post It 654	0
000016	Post It 656	0
000020	Kertas Fax	0
000021	Kertas Post It Warna	650,000
1010302004	Amplop	1,080,000
000002	Amplop Putih	1,080,000
1010302005	Kop Surat	3,400,000
000001	Kop. Surat Set.KIP Logo Kominfo A4	0
000004	Kop. Surat KIP Logo Garuda Emas Tengah F4	0
000005	Kop Surat Garuda Emas F4	0
000007	KOP SURAT KOMINFO LOGO MODI	0
000008	KOP SURAT KI PUSAT F4 PINGGIR	0
000009	KOP.SURAT KOMINFO A4	0
000010	KOP SURAT KOMINFO F4	0
000011	KOP SURAT LOGO GARUDA TENGAH A4	1,750,000
000012	KOP SURAT LOGO GARUDA PINGGIR F4	1,650,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	34,759,500
000001	Boneka Maskot KI Pusat Sasi Saki	3,200,000
000002	Plakat KI Pusat Model Gembok	0
000003	Payung KI Pusat	31,559,500
1010304004	Tinta/Toner Printer	29,917,000
000026	Refill Toner HP CE 285 A	0
000051	Refill Toner Samsung MLT	0
000055	Toner Brodher	0
000062	Toner HP 107 A	6,232,000
000063	Tinta Epson Cair L 1110 Black	860,000
000064	Tinta Epson Cair L 1110 Yellow	1,075,000
000065	Tinta Epson Cair L 1110 Magenta	1,290,000
000066	Tinta Epson Cair L 1110 Cyan	1,075,000
000067	Tinta Epson L310 Black	0
000068	Tinta Espon L310 Yellow	0
000069	Tinta Epson L310 Magenta	0
000070	Tinta Epson L310 Cyan	0
000071	Tinta Epson L310 Yellow	0
000072	Tinta Epson L15150 Black	6,300,000
000073	Tinta Epson L15150 Yellow	3,850,000
000074	Tinta Epson L15150 Magenta	3,150,000
000075	Tinta Epson L15150 Cyan	3,850,000
000076	Tinta Epson Cair 001 Black	235,000
000077	Tinta Epson Cair 001 Yellow	180,000
000078	Tinta Epson Cair 001 Magenta	180,000
000079	Tiinta Epson Cair 001 Cyan	540,000
000080	Tinta Epson Cair L 003 Black	300,000
000081	Tinta Epson Cair L 003 Yellow	200,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000082	Tinta Epson Cair L 003 Magenta	300,000
000083	Tinta Epson Cair L 003 Cyan	300,000
1010304006	USB/Flash Disk	760,000
000010	Flashdisk 32 GB Kingstone	760,000
000012	Flashdisk 64 GB Kingstone	0
1010306010	Batu Baterai	5,846,800
000017	batu baterai A2	0
000018	Baterai AA	4,395,000
000019	Baterai AAA	1,451,800
Jumlah per Akun		371,516,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305006	Alat Pengikat	0
000002	Lakban	0
000003	Lakban Linen Hitam	0
000004	Lakban Cokelat Besar	0
000009	Lakban Hitam (2 Inci)	0
000010	Lakban Bening (2 Inci)	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		371,516,000

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
 2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 07-05-2025

Kuasa Pengguna Barang

A.n Plh Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bernard Yuari Putranto
 NIP.198303032008031001

Jakarta, 07-05-2025

Petugas Pengelola Persediaan

Rizki Susanto
 NIP.-

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:28 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		759	5,423,458,589	137	921,761,560	65	243,596,141	831	6,101,624,008	
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	8,400,000	2	19,791,200	0	0	3	28,191,200	
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	37,244,886	1	12,500,000	0	0	3	49,744,886	
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	1	71,500,000	0	0	0	0	1	71,500,000	
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	1	4,267,100	0	0	0	0	1	4,267,100	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	69,589,000	20	45,370,000	10	37,300,000	31	77,659,000	
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	9,500,000	0	0	0	0	2	9,500,000	
3050104014	Mobile File	Buah	1	32,000,000	0	0	0	0	1	32,000,000	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	5,240,500	0	0	0	0	1	5,240,500	
3100102003	Note Book	Buah	54	809,600,700	5	97,500,000	10	100,036,800	49	807,063,900	
3060102016	Video Switcher	Buah	1	14,800,500	0	0	0	0	1	14,800,500	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	37	87,032,950	1	6,900,810	2	2,400,000	36	91,533,760	
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	1	4,500,000	0	0	1	4,500,000	
3050204003	A.C. Window	Buah	2	46,000,000	0	0	0	0	2	46,000,000	
3100201009	Serial Printer	Buah	1	4,889,720	0	0	0	0	1	4,889,720	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	8,900,000	0	0	0	0	1	8,900,000	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	80,711,750	0	0	0	0	13	80,711,750	
3070108022	Stool Fixed Height	Buah	15	26,340,000	0	0	0	0	15	26,340,000	
3060102128	Camera Digital	Buah	3	41,500,400	0	0	0	0	3	41,500,400	
3050104024	Laci Box	Buah	9	18,968,875	0	0	0	0	9	18,968,875	
3080302034	Paper Tape Scanner	Buah	1	3,209,745	0	0	0	0	1	3,209,745	
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	3	4,120,000	0	0	0	0	3	4,120,000	
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	15	325,317,724	6	45,200,000	0	0	21	370,517,724	
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	14,702,000	0	0	0	0	2	14,702,000	
3080112025	Stabilizer	Buah	1	2,801,000	0	0	0	0	1	2,801,000	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	12	87,591,875	0	0	0	0	12	87,591,875	
3050206002	Televisi	Buah	16	129,466,300	2	6,918,300	0	0	18	136,384,600	
3080714007	Wireless Data Tranmission System	Buah	3	32,425,600	0	0	0	0	3	32,425,600	
3100102001	P.C Unit	Buah	15	259,930,300	0	0	0	0	15	259,930,300	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	27,745,600	2	27,726,000	0	0	5	55,471,600	
3050104013	Buffet	Buah	13	22,693,000	0	0	0	0	13	22,693,000	
3100204024	Switch	Buah	2	3,364,020	0	0	0	0	2	3,364,020	
3050201005	Sice	Buah	13	201,800,000	4	16,000,000	0	0	17	217,800,000	
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	9,200,000	0	0	0	0	1	9,200,000	
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,995,000	4	17,000,000	0	0	5	21,995,000	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	11,365,000	0	0	0	0	1	11,365,000	
3060201004	Telephone Mobile	Buah	1	16,500,000	0	0	0	0	1	16,500,000	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:28 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3100202017	Speaker Komputer	Buah	1	8,436,400	1	11,029,200	0	0	2	19,465,600	
3050201008	Meja Rapat	Buah	18	61,250,400	7	29,800,000	1	7,200,000	24	83,850,400	
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	605,000	0	0	0	0	2	605,000	
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	675,235,000	0	0	0	0	4	675,235,000	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	5,825,000	0	0	1	1,325,000	3	4,500,000	
3050104020	Lemari Display	Buah	2	15,850,000	0	0	0	0	2	15,850,000	
3060102165	Camera Conference	Buah	5	43,519,600	2	18,227,200	0	0	7	61,746,800	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	9,010,000	0	0	0	0	5	9,010,000	
3080111137	Tripod	Buah	1	3,242,000	0	0	0	0	1	3,242,000	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	249	496,486,531	50	127,690,000	31	38,721,831	268	585,454,700	
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,537,500	0	0	0	0	1	2,537,500	
3060102159	Clipp On	Buah	1	13,860,000	0	0	0	0	1	13,860,000	
3020104002	Scooter	Unit	3	93,111,000	0	0	0	0	3	93,111,000	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	27,897,500	1	36,000,000	0	0	14	63,897,500	
3050204004	A.C. Split	Buah	10	139,943,193	3	48,000,000	0	0	13	187,943,193	
3050206020	Camera Video	Buah	3	67,923,000	0	0	0	0	3	67,923,000	
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	0	0	1	15,800,000	0	0	1	15,800,000	
3100102009	Tablet PC	Buah	4	51,024,600	0	0	0	0	4	51,024,600	
3100101002	Mini Komputer	Buah	5	37,496,600	0	0	0	0	5	37,496,600	
3100204002	Router	Buah	2	4,709,640	0	0	0	0	2	4,709,640	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	45,239,000	0	0	5	7,537,500	17	37,701,500	
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	5,885,000	1	12,758,100	0	0	2	18,643,100	
3080602046	Air Purlier	Buah	1	4,676,400	0	0	0	0	1	4,676,400	
3050201031	Meja TV	Buah	0	0	1	4,000,000	0	0	1	4,000,000	
3050201030	Meja Taman	Buah	1	1,750,000	7	13,050,000	0	0	8	14,800,000	
3050206036	Dispenser	Buah	4	16,088,000	2	5,780,050	0	0	6	21,868,050	
3050201004	Kursi Kayu	Buah	22	90,489,000	0	0	0	0	22	90,489,000	
3050104007	Brandkas	Buah	1	22,500,000	0	0	0	0	1	22,500,000	
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	8,399,000	0	0	0	0	2	8,399,000	
3060101031	Intercom Unit	Buah	1	22,036,000	0	0	0	0	1	22,036,000	
3100204014	Rak Server	Buah	1	11,774,110	0	0	0	0	1	11,774,110	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000	
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	50,376,500	4	144,608,500	0	0	19	194,985,000	
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	2	89,400,000	1	58,230,000	0	0	3	147,630,000	
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	19,500,000	0	0	0	0	3	19,500,000	
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,842,500	0	0	0	0	2	3,842,500	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	67	578,556,670	7	92,007,200	5	49,075,010	69	621,488,860	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:28 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	32,000,000	1	5,375,000	0	0	3	37,375,000	
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	23,000,000	0	0	0	0	1	23,000,000	
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	5,720,000	0	0	0	0	1	5,720,000	
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	3,669,200	0	0	0	0	2	3,669,200	
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	3	89,377,200	0	0	0	0	3	89,377,200	
3060201010	Facsimile	Buah	2	6,623,500	0	0	0	0	2	6,623,500	
135121	Aset Tetap Lainnya		227	49,473,000	0	0	0	0	227	49,473,000	
6010101001	Monografi	Buah	223	49,033,000	0	0	0	0	223	49,033,000	
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	440,000	0	0	0	0	4	440,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		64	195,218,620	65	243,596,141	129	438,814,761	0	0	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	8,046,000	2	2,400,000	8	10,446,000	0	0	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	29	46,680,810	31	38,721,831	60	85,402,641	0	0	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	13,431,110	5	49,075,010	7	62,506,120	0	0	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	6,000,000	1	1,325,000	5	7,325,000	0	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	2,530,000	0	0	2	2,530,000	0	0	
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,182,500	0	0	1	1,182,500	0	0	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1	20,876,200	0	0	1	20,876,200	0	0	
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	9,847,500	0	0	1	9,847,500	0	0	
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	12,750,000	0	0	1	12,750,000	0	0	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	29,780,000	10	37,300,000	18	67,080,000	0	0	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	8,910,000	0	0	2	8,910,000	0	0	
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	11,660,000	1	7,200,000	2	18,860,000	0	0	
3100102003	Note Book	Buah	0	0	10	100,036,800	10	100,036,800	0	0	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000	0	0	
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	2,557,000	0	0	1	2,557,000	0	0	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	6,200,000	0	0	1	6,200,000	0	0	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	5,907,500	5	7,537,500	7	13,445,000	0	0	
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,860,000	0	0	1	2,860,000	0	0	
TOTAL				5,668,150,209		1,165,357,701		682,410,902		6,151,097,008	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
132111	Peralatan dan Mesin		2	242,000	0	0	0	0	2	242,000	
3050206077	Bendera Negara	-	2	242,000	0	0	0	0	2	242,000	
TOTAL				242,000			0		0	242,000	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:41 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
132111	Peralatan dan Mesin		761	5,423,700,589	137	921,761,560	65	243,596,141	833	6,101,866,008	
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	675,235,000	0	0	0	0	4	675,235,000	
3020104002	Scooter	Unit	3	93,111,000	0	0	0	0	3	93,111,000	
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	23,000,000	0	0	0	0	1	23,000,000	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	12	87,591,875	0	0	0	0	12	87,591,875	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	27,897,500	1	36,000,000	0	0	14	63,897,500	
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,842,500	0	0	0	0	2	3,842,500	
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,537,500	0	0	0	0	1	2,537,500	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	45,239,000	0	0	5	7,537,500	17	37,701,500	
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	15	325,317,724	6	45,200,000	0	0	21	370,517,724	
3050104007	Brandkas	Buah	1	22,500,000	0	0	0	0	1	22,500,000	
3050104013	Buffet	Buah	13	22,693,000	0	0	0	0	13	22,693,000	
3050104014	Mobile File	Buah	1	32,000,000	0	0	0	0	1	32,000,000	
3050104020	Lemari Display	Buah	2	15,850,000	0	0	0	0	2	15,850,000	
3050104024	Laci Box	Buah	9	18,968,875	0	0	0	0	9	18,968,875	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	21	69,589,000	20	45,370,000	10	37,300,000	31	77,659,000	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	9,010,000	0	0	0	0	5	9,010,000	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	5,240,500	0	0	0	0	1	5,240,500	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	32,000,000	1	5,375,000	0	0	3	37,375,000	
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	14,702,000	0	0	0	0	2	14,702,000	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	67	578,556,670	7	92,007,200	5	49,075,010	69	621,488,860	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	249	496,486,531	50	127,690,000	31	38,721,831	268	585,454,700	
3050201004	Kursi Kayu	Buah	22	90,489,000	0	0	0	0	22	90,489,000	
3050201005	Sice	Buah	13	201,800,000	4	16,000,000	0	0	17	217,800,000	
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	0	0	1	15,800,000	0	0	1	15,800,000	
3050201008	Meja Rapat	Buah	18	61,250,400	7	29,800,000	1	7,200,000	24	83,850,400	
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,995,000	4	17,000,000	0	0	5	21,995,000	
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	2	89,400,000	1	58,230,000	0	0	3	147,630,000	
3050201030	Meja Taman	Buah	1	1,750,000	7	13,050,000	0	0	8	14,800,000	
3050201031	Meja TV	Buah	0	0	1	4,000,000	0	0	1	4,000,000	
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	8,399,000	0	0	0	0	2	8,399,000	
3050204003	A.C. Window	Buah	2	46,000,000	0	0	0	0	2	46,000,000	
3050204004	A.C. Split	Buah	10	139,943,193	3	48,000,000	0	0	13	187,943,193	
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	19,500,000	0	0	0	0	3	19,500,000	
3050205008	Kitchen Set	Buah	2	37,244,886	1	12,500,000	0	0	3	49,744,886	
3050206002	Televisi	Buah	16	129,466,300	2	6,918,300	0	0	18	136,384,600	
3050206020	Camera Video	Buah	3	67,923,000	0	0	0	0	3	67,923,000	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:41 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000	
3050206036	Dispenser	Buah	4	16,088,000	2	5,780,050	0	0	6	21,868,050	
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	1	4,500,000	0	0	1	4,500,000	
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	605,000	0	0	0	0	2	605,000	
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	3	89,377,200	0	0	0	0	3	89,377,200	
3050206077	Bendera Negara	Buah	2	242,000	0	0	0	0	2	242,000	
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	1	4,267,100	0	0	0	0	1	4,267,100	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	8,900,000	0	0	0	0	1	8,900,000	
3060101031	Intercom Unit	Buah	1	22,036,000	0	0	0	0	1	22,036,000	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	27,745,600	2	27,726,000	0	0	5	55,471,600	
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	9,200,000	0	0	0	0	1	9,200,000	
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	1	71,500,000	0	0	0	0	1	71,500,000	
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	3	4,120,000	0	0	0	0	3	4,120,000	
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	8,400,000	2	19,791,200	0	0	3	28,191,200	
3060102016	Video Switcher	Buah	1	14,800,500	0	0	0	0	1	14,800,500	
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	3,669,200	0	0	0	0	2	3,669,200	
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	5,885,000	1	12,758,100	0	0	2	18,643,100	
3060102128	Camera Digital	Buah	3	41,500,400	0	0	0	0	3	41,500,400	
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	5,720,000	0	0	0	0	1	5,720,000	
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	50,376,500	4	144,608,500	0	0	19	194,985,000	
3060102159	Clipp On	Buah	1	13,860,000	0	0	0	0	1	13,860,000	
3060102165	Camera Conference	Buah	5	43,519,600	2	18,227,200	0	0	7	61,746,800	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	11,365,000	0	0	0	0	1	11,365,000	
3060201004	Telephone Mobile	Buah	1	16,500,000	0	0	0	0	1	16,500,000	
3060201010	Faxsimile	Buah	2	6,623,500	0	0	0	0	2	6,623,500	
3070108022	Stool Fixed Height	Buah	15	26,340,000	0	0	0	0	15	26,340,000	
3080111137	Tripod	Buah	1	3,242,000	0	0	0	0	1	3,242,000	
3080112025	Stabilizer	Buah	1	2,801,000	0	0	0	0	1	2,801,000	
3080302034	Paper Tape Scanner	Buah	1	3,209,745	0	0	0	0	1	3,209,745	
3080602046	Air Purifier	Buah	1	4,676,400	0	0	0	0	1	4,676,400	
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	9,500,000	0	0	0	0	2	9,500,000	
3080714007	Wireless Data Transmission System	Buah	3	32,425,600	0	0	0	0	3	32,425,600	
3100101002	Mini Komputer	Buah	5	37,496,600	0	0	0	0	5	37,496,600	
3100102001	P.C Unit	Buah	15	259,930,300	0	0	0	0	15	259,930,300	
3100102003	Note Book	Buah	54	809,600,700	5	97,500,000	10	100,036,800	49	807,063,900	
3100102009	Tablet PC	Buah	4	51,024,600	0	0	0	0	4	51,024,600	
3100201009	Serial Printer	Buah	1	4,889,720	0	0	0	0	1	4,889,720	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
UAKPB : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:41 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3100202017	Speaker Komputer	Buah	1	8,436,400	1	11,029,200	0	0	2	19,465,600	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	37	87,032,950	1	6,900,810	2	2,400,000	36	91,533,760	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	80,711,750	0	0	0	0	13	80,711,750	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	5,825,000	0	0	1	1,325,000	3	4,500,000	
3100204002	Router	Buah	2	4,709,640	0	0	0	0	2	4,709,640	
3100204014	Rak Server	Buah	1	11,774,110	0	0	0	0	1	11,774,110	
3100204024	Switch	Buah	2	3,364,020	0	0	0	0	2	3,364,020	
135121	Aset Tetap Lainnya		227	49,473,000	0	0	0	0	227	49,473,000	
6010101001	Monografi	Buah	223	49,033,000	0	0	0	0	223	49,033,000	
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	440,000	0	0	0	0	4	440,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		64	195,218,620	65	243,596,141	129	438,814,761	0	0	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1	20,876,200	0	0	1	20,876,200	0	0	
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,182,500	0	0	1	1,182,500	0	0	
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,860,000	0	0	1	2,860,000	0	0	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	5,907,500	5	7,537,500	7	13,445,000	0	0	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	29,780,000	10	37,300,000	18	67,080,000	0	0	
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	9,847,500	0	0	1	9,847,500	0	0	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	8,910,000	0	0	2	8,910,000	0	0	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000	0	0	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	13,431,110	5	49,075,010	7	62,506,120	0	0	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	29	46,680,810	31	38,721,831	60	85,402,641	0	0	
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	11,660,000	1	7,200,000	2	18,860,000	0	0	
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	12,750,000	0	0	1	12,750,000	0	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	2,530,000	0	0	2	2,530,000	0	0	
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	2,557,000	0	0	1	2,557,000	0	0	
3100102003	Note Book	Buah	0	0	10	100,036,800	10	100,036,800	0	0	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	8,046,000	2	2,400,000	8	10,446,000	0	0	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	6,200,000	0	0	1	6,200,000	0	0	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	6,000,000	1	1,325,000	5	7,325,000	0	0	
TOTAL				5,668,392,209		1,165,357,701		682,410,902		6,151,339,008	

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

**UAPB : 059
UAKPB : 677382**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tanggal : 07/05/25 5:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
 Tanggal : 07/05/25 5:49 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
162151	Software		0	0	0	0	0	0	0	0	
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		0	0	0	0	0	0	0	0	
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				0		0		0		0	

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER DESEMBER 2024 AUDITED**

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KODE UAKPB : 059.01.0199.677382

Tanggal : 07/05/2025 17.50.26

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang			N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Jumlah null</i>									

Penanggung Jawab UAKPB

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
UAKPB : 677382 **SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT**

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
						SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8		
132111	Peralatan dan Mesin		831	6,101,624,008	(3,604,604,671)	(569,578,552)	(4,174,183,223)	1,927,440,785		
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	675,235,000	(675,235,000)	0	(675,235,000)	0		
3020104002	Scooter	Unit	3	93,111,000	(33,253,932)	(13,301,571)	(46,555,503)	46,555,497		
3040103007	Alat Penggiling Kopi	Buah	1	23,000,000	(23,000,000)	0	(23,000,000)	0		
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	12	87,591,875	(77,767,600)	(3,477,475)	(81,245,075)	6,346,800		
3050104002	Lemari Kayu	Buah	14	63,897,500	(14,494,250)	(7,429,500)	(21,923,750)	41,973,750		
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,842,500	(3,842,500)	0	(3,842,500)	0		
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,537,500	(2,537,500)	0	(2,537,500)	0		
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	17	37,701,500	(37,349,450)	4,726,200	(32,623,250)	5,078,250		
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	21	370,517,724	(97,379,017)	(72,383,545)	(169,762,562)	200,755,162		
3050104007	Brandkas	Buah	1	22,500,000	(22,500,000)	0	(22,500,000)	0		
3050104013	Buffet	Buah	13	22,693,000	(22,693,000)	0	(22,693,000)	0		
3050104014	Mobile File	Buah	1	32,000,000	(32,000,000)	0	(32,000,000)	0		
3050104020	Lemari Display	Buah	2	15,850,000	(7,595,000)	(3,170,000)	(10,765,000)	5,085,000		
3050104024	Laci Box	Buah	9	18,968,875	(9,107,550)	(3,793,775)	(12,901,325)	6,067,550		
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	31	77,659,000	(46,741,800)	22,514,200	(24,227,600)	53,431,400		
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	9,010,000	(4,505,000)	(1,802,000)	(6,307,000)	2,703,000		
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	5,240,500	(5,240,500)	0	(5,240,500)	0		
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	37,375,000	(27,000,000)	(10,375,000)	(37,375,000)	0		
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	14,702,000	(6,412,600)	(2,368,400)	(8,781,000)	5,921,000		
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	69	621,488,860	(388,318,220)	(27,703,840)	(416,022,060)	205,466,800		
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	268	585,454,700	(318,480,131)	(31,891,569)	(350,371,700)	235,083,000		
3050201004	Kursi Kayu	Buah	22	90,489,000	(90,489,000)	0	(90,489,000)	0		
3050201005	Sice	Buah	17	217,800,000	(167,900,000)	(11,120,000)	(179,020,000)	38,780,000		
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	1	15,800,000	0	(3,160,000)	(3,160,000)	12,640,000		
3050201008	Meja Rapat	Buah	24	83,850,400	(61,250,400)	2,075,000	(59,175,400)	24,675,000		
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	5	21,995,000	(499,500)	(4,399,000)	(4,898,500)	17,096,500		
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	3	147,630,000	(40,080,000)	(29,526,000)	(69,606,000)	78,024,000		
3050201030	Meja Taman	Buah	8	14,800,000	(175,000)	(2,960,000)	(3,135,000)	11,665,000		
3050201031	Meja TV	Buah	1	4,000,000	0	(800,000)	(800,000)	3,200,000		
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	8,399,000	(6,526,500)	(749,000)	(7,275,500)	1,123,500		
3050204003	A.C. Window	Buah	2	46,000,000	(46,000,000)	0	(46,000,000)	0		
3050204004	A.C. Split	Buah	13	187,943,193	(46,197,276)	(35,988,639)	(82,185,915)	105,757,278		
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	19,500,000	(19,500,000)	0	(19,500,000)	0		
3050205008	Kitchen Set	Buah	3	49,744,886	(12,223,467)	(9,648,977)	(21,872,444)	27,872,442		
3050206002	Televisi	Buah	18	136,384,600	(109,335,680)	(8,254,190)	(117,589,870)	18,794,730		
3050206020	Camera Video	Buah	3	67,923,000	(48,441,000)	(10,584,600)	(59,025,600)	8,897,400		

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:53 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	880,000	(880,000)	0	(880,000)	0	
3050206036	Dispenser	Buah	6	21,868,050	(9,517,600)	(4,196,350)	(13,713,950)	8,154,100	
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4,500,000	0	(900,000)	(900,000)	3,600,000	
3050206040	Palu Sidang	Buah	2	605,000	(605,000)	0	(605,000)	0	
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	3	89,377,200	(24,282,360)	(17,875,440)	(42,157,800)	47,219,400	
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	1	4,267,100	(2,133,550)	(853,420)	(2,986,970)	1,280,130	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	8,900,000	(8,900,000)	0	(8,900,000)	0	
3060101031	Intercom Unit	Buah	1	22,036,000	(6,610,800)	(4,407,200)	(11,018,000)	11,018,000	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	5	55,471,600	(8,129,120)	(11,094,320)	(19,223,440)	36,248,160	
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	9,200,000	(2,760,000)	(1,840,000)	(4,600,000)	4,600,000	
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	1	71,500,000	(71,500,000)	0	(71,500,000)	0	
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	3	4,120,000	(4,120,000)	0	(4,120,000)	0	
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	3	28,191,200	(2,520,000)	(5,309,120)	(7,829,120)	20,362,080	
3060102016	Video Switcher	Buah	1	14,800,500	(7,400,250)	(2,960,100)	(10,360,350)	4,440,150	
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	3,669,200	(2,233,440)	(358,940)	(2,592,380)	1,076,820	
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	18,643,100	(4,708,000)	(3,728,620)	(8,436,620)	10,206,480	
3060102128	Camera Digital	Buah	3	41,500,400	(23,107,280)	(4,598,280)	(27,705,560)	13,794,840	
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	5,720,000	(4,576,000)	(1,144,000)	(5,720,000)	0	
3060102135	LCD Monitor	Buah	19	194,985,000	(16,193,079)	(37,101,749)	(53,294,828)	141,690,172	
3060102159	Clipp On	Buah	1	13,860,000	(11,088,000)	(2,772,000)	(13,860,000)	0	
3060102165	Camera Conference	Buah	7	61,746,800	(15,531,760)	(10,526,640)	(26,058,400)	35,688,400	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	11,365,000	(11,365,000)	0	(11,365,000)	0	
3060201004	Telephone Mobile	Buah	1	16,500,000	(9,900,000)	(3,300,000)	(13,200,000)	3,300,000	
3060201010	Facsimile	Buah	2	6,623,500	(6,623,500)	0	(6,623,500)	0	
3070108022	Stool Fixed Height	Buah	15	26,340,000	(8,074,000)	(5,268,000)	(13,342,000)	12,998,000	
3080111137	Tripod	Buah	1	3,242,000	(607,875)	(405,250)	(1,013,125)	2,228,875	
3080112025	Stabilizer	Buah	1	2,801,000	(350,125)	(350,125)	(700,250)	2,100,750	
3080302034	Paper Tape Scanner	Buah	1	3,209,745	(1,497,881)	(213,983)	(1,711,864)	1,497,881	
3080602046	Air Purifier	Buah	1	4,676,400	(668,058)	(668,057)	(1,336,115)	3,340,285	
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	9,500,000	(6,928,571)	(1,357,143)	(8,285,714)	1,214,286	
3080714007	Wireless Data Tramission System	Buah	3	32,425,600	(1,910,853)	(2,161,706)	(4,072,559)	28,353,041	
3100101002	Mini Komputer	Buah	5	37,496,600	(6,280,826)	(9,374,152)	(15,654,978)	21,841,622	
3100102001	P.C Unit	Buah	15	259,930,300	(140,376,489)	(55,407,825)	(195,784,314)	64,145,986	
3100102003	Note Book	Buah	49	807,063,900	(511,815,914)	(78,484,448)	(590,300,362)	216,763,538	
3100102009	Tablet PC	Buah	4	51,024,600	(15,465,825)	(12,756,150)	(28,221,975)	22,802,625	
3100201009	Serial Printer	Buah	1	4,889,720	(4,889,720)	0	(4,889,720)	0	
3100202017	Speaker Komputer	Buah	2	19,465,600	(1,054,550)	(4,866,400)	(5,920,950)	13,544,650	

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPP : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:53 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED						
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
						SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8		
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	36	91,533,760	(56,545,477)	(12,613,553)	(69,159,030)	22,374,730		
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	80,711,750	(63,710,125)	(8,438,900)	(72,149,025)	8,562,725		
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	4,500,000	(5,825,000)	1,325,000	(4,500,000)	0		
3100204002	Router	Buah	2	4,709,640	(4,709,640)	0	(4,709,640)	0		
3100204014	Rak Server	Buah	1	11,774,110	(11,774,110)	0	(11,774,110)	0		
3100204024	Switch	Buah	2	3,364,020	(3,364,020)	0	(3,364,020)	0		
135121	Aset Tetap Lainnya		227	49,473,000	0	0	0	49,473,000		
6010101001	Monografi	Buah	223	49,033,000	0	0	0	49,033,000		
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	440,000	0	0	0	440,000		
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(195,218,620)	195,218,620	0	0		
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	(20,876,200)	20,876,200	0	0		
3050104003	Rak Besi	Buah	0	0	(1,182,500)	1,182,500	0	0		
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	(2,860,000)	2,860,000	0	0		
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	(5,907,500)	5,907,500	0	0		
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	(29,780,000)	29,780,000	0	0		
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	(9,847,500)	9,847,500	0	0		
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	(8,910,000)	8,910,000	0	0		
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	(6,000,000)	6,000,000	0	0		
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	(13,431,110)	13,431,110	0	0		
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	(46,680,810)	46,680,810	0	0		
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	(11,660,000)	11,660,000	0	0		
3050206042	Lambang Instansi	Buah	0	0	(12,750,000)	12,750,000	0	0		
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	(2,530,000)	2,530,000	0	0		
3060102135	LCD Monitor	Buah	0	0	(2,557,000)	2,557,000	0	0		
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	(8,046,000)	8,046,000	0	0		
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	(6,200,000)	6,200,000	0	0		
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	(6,000,000)	6,000,000	0	0		
JUMLAH			1,058	6,151,097,008	(3,799,823,291)	(374,359,932)	(4,174,183,223)	1,976,913,785		

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UAKPB : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 5:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		2	242,000	(242,000)	0	(242,000)	0
3050206077	Bendera Negara	Buah	2	242,000	(242,000)	0	(242,000)	0
JUMLAH			2	242,000	(242,000)	0	(242,000)	0



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Gedung Wisma BSG Lt.9 Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 <http://komisiinformasi.go.id/>

**BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PADA UAPKPB SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
SEMESTER II TAHUN 2024**

Nomor : B-567/Set.KIP.31/PL.06.05/12/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** jam **10.00 WIB**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muhammad Anwar
NIP : 198011042009011007
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda
2. Nama : Rizki Susanto
NIP : -
Jabatan : Petugas BMN/Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname fisik) dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2024 dengan rincian hasil sebagai berikut :

No.	Kode	Akun Neraca	Nilai Persediaan		
			Saldo Per 30 Juni 2024	Mutasi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
				Tambah	Kurang
		Persediaan			
1	117111	Barang Konsumsi	225,620,800	602,383,500	456,488,300
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	117114	Suku Cadang			0
4	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges			0
5	117131	Bahan Baku			0

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E

Hal-hal penting lainnya mengenai data barang persediaan terkait penyusunan Laporan Barang Milik Negara dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini .

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan BMN dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Yang menyatakan,

Nama : Muhammad Anwar
NIP : 198011042009011007
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Mengetahui

Jakarta, 31 Desember 2024
Unit Akuntansi Pembantu
Kuasa Pengguna Barang,

Nama : Rizki Susanto
NIP : -
Jabatan : Petugas BMN/Persediaan.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran Berita Acara Hasil Opname Fisik
 (Stock Opname) Persediaan
 Nomor : B-567/Set.KIP.31/PL.06.05/12/2024
 Tanggal : 31 Desember 2024

**KERTAS KERJA OPNAME FISIK PERSEDIAAN
 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
 PERIODE SEMESTER II TA 2024
 PER 31 Desember 2024**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	Saldo Laporan Persediaan	Hasil cek Fisik	Selisih (Jumlah)	Saldo Laporan Setelah Opname Fisik	Kondisi		
							Baik	Rusak/Usang	Ket
Alat Tulis									
1	101030100000038	Ballpoint	259	259	0	259	v		
2	101030100000041	Balliner Biru	34	34	0	34	v		
3	101030100000042	Spidol White Board Hitam	122	122	0	122	v		
4	101030100000044	Spidol White Board Biru	30	30	0	30	v		
5	101030100000045	Spidol Permanent Merah	33	33	0	33	v		
6	101030100000046	Spidol Permanent Biru	15	15	0	15	v		
7	101030100000047	Spidol Permenent Hitam	7	7	0	7	v		
8	101030100000055	Stabilo Boss	6	6	0	6	v		
Korektor									
9	10103010000011	Type EX	26	26	0	26	v		
10	10103010000016	PENGHAPUS PENSIL	5	5	0	5	v		
Penjepit Kertas									
11	10103010000002	Binder Clip No.260	8	8	0	8	v		
12	10103010000003	Binder Clip No.200	10	10	0	10	v		
13	10103010000016	Binder Clip No.105	12	12	0	12	v		
14	10103010000040	PAPER CLIP	9	9	0	9	v		

Catalan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

	Buku Tulis		4	4	0	4	v		
15	101030100000016	Buku Kuitansi	4	4	0	4	v		
	Ordner dan MAP		615	615	0	615	v		
16	101030100000003	Bindex Ordner	4	4	0	4	v		
17	101030100000007	Box File Arsip Bindex Besar	11	11	0	11	v		
18	101030100000028	Plastik File PP Pocket A4 No.2040	600	600	0	600	v		
	Penggaris		14	14	0	14	v		
19	101030100000005	Penggaris Mika 30 CM	14	14	0	14	v		
	Cutter (Alat Tulis Kantor)		22	22	0	22	v		
20	101030100000003	Cutter L.500	22	22	0	22	v		
	Alat Perekat		82	82	0	82	v		
21	101030100000013	Lem Stick	31	31	0	31	v		
22	101030100000028	LAKBAN HITAM 2 INCI	14	14	0	14	v		
23	101030100000029	LAKBAN BENING 2 INCI	17	17	0	17	v		
24	101030100000031	Post It Sign Here	8	8	0	8	v		
25	101030100000033	Selotip Kecil	12	12	0	12			
	Staples		55	55	0	55	v		
26	101030100000001	Staples HD10	31	31	0	31	v		
27	101030100000004	Stapler HD 30 Staples Besar	24	24	0	24	v		
	Isi Staples		20	20	0	20	v		
28	101030100000001	Isi Staples HD No.10	7	7	0	7	v		
29	101030100000002	Isi Staples HD No. 3	13	13	0	13	v		
	Barang Cetakan		1689	1689	0	1689	v		

Catalan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

30	10103010000048	PLAKAT KI PUSAT	17	17	0	17	v		
31	101030100000101	Buku Perki 1 Tahun 2019 Tentan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu	16	16	0	16	v		
32	101030100000102	Buku Perki Slip Desa	9	9	0	9	v		
33	101030100000120	Buku UU Keterbukaan Informasi Publik	22	22	0	22	v		
34	101030100000128	Buku Perki I Tahun 2021 tentang SLIP	38	38	0	38	v		
35	101030100000130	MAP KOMISI INFORMASI PUSAT	415	415	0	415	v		
36	101030100000132	Amplop Besar Logo Garuda KIP	325	325	0	325	v		
37	101030100000137	Goody Bag Bahan Drill	605	605	0	605	v		
38	101030100000138	Map Kepegawain Rahasia	100	100	0	100	v		
39	101030100000139	Buku Perki No.1/2024 SOTK KI	100	100	0	100	v		
40	101030100000140	Buku Agenda Kerja KI Pusat	42	42	0	42	v		
41	101030100000141	Buku Sejarah KI	100	100	0	100	v		
42	101030100000142	Kalender Meja KI Pusat Tahun 2025	227	227	0	227	v		
43	101030100000143	Buku Memahami Sengketa Informasi Publik	100	100	0	100	v		
44	101030100000144	Buku tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	100	0	100	v		
45	101030100000145	Buku Pilkada	100	100	0	100	v		
Alat Tulis Kantor Lainnya			10	10	0	10	v		
46	10103010000027	Gunting	2	2	0	2	v		
47	10103010000038	Pembolong Kertas Besar	8	8	0	8	v		
48	10103010000039	Dispenser Isolasi	3	3	0	3	v		
kertas HVS			95	95	0	95	v		
49	10103010000012	Kertas HVS A4 Paper One 75 Gr	57	57	0	57	v		
50	10103010000013	Kertas HVS F4 Paper One 75 Gr	38	38	0	38	v		

Catalan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

	Amplop		60	60	0	60	v		
51	10103010000002	Amplop Putih	60	60	0	60	v		
	Berbagai Kertas		25	25	0	25	v		
52	10103010000021	Kertas Post It Warna	25	25	0	25	v		
	Kop Surat		13	13	0	13	v		
53	10103010000011	KOP SURAT LOGO GARUDA TENGAH A4	7	7	0	7	v		
54	10103010000012	KOP SURAT LOGO GARUDA PINGGIR F4	6	6	0	6	v		
	Bahan Cetakan Lainnya		20	20	0	20	v		
55	10103010000001	Boneka Maskot KI Pusat Sasi Saki	20	20	0	20	v		
56	000003	Payung KI Pusat	127	127	0	127			
	Tinta/Toner Printer		71	71	0	71	v		
57	10103010000062	Toner HP 107 A	8	8	0	8	v		
58	10103010000063	Tinta Epson Cair L 1110 Black	4	4	0	4	v		
59	10103010000064	Tinta Epson Cair L 1110 Yellow	5	5	0	5	v		
60	10103010000065	Tinta Epson Cair L 1110 Magenta	6	6	0	6	v		
61	10103010000066	Tinta Epson Cair L 1110 Cyan	5	5	0	5	v		
62	10103010000072	Tinta Epson L15150 Black	14	14	0	14	v		
63	10103010000073	Tinta Epson L15150 Yellow	11	11	0	11	v		
64	10103010000074	Tinta Epson L15150 Magenta	9	9	0	9	v		
65	10103010000075	Tinta Epson L15150 Cyan	11	11	0	11	v		
66	10103010000076	Tinta Epson Cair 001 Black	1	1	0	1	v		
67	10103010000077	Tinta Epson Cair 001 Yellow	1	1	0	1	v		

Catalan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

68	10103010000078	Tinta Epson Cair 001 Magenta	1	1	0	1	v		
69	10103010000079	Tinta Epson Cair 001 Cyan	3	3	0	3	v		
70	10103010000080	Tinta Epson Cair L 003 Black	2	2	0	2	v		
71	10103010000081	Tinta Epson Cair L 003 Yellow	2	2	0	2	v		
72	10103010000082	Tinta Epson Cair L 003 Magenta	3	3	0	3	v		
73	10103010000083	Tinta Epson Cair L 003 Cyan	3	3	0	3	v		
USB/FLASH DISK			4	4	0	4	v		
74	10103010000018	Flashdisk 32 GB Kingstone	4	4	0	4	v		
Batu Baterai			415	415	0	415	v		
75	10103010000018	Baterai AA	293	293	0	293	v		
76	10103010000019	Baterai AAA	122	122	0	122	v		

Nama

Nama : Muhammad Anwar
 NIP : 198011042009011007
 Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Ttd

Jakarta, 31 Desember 2024
 Unit Akuntansi Pembantu
 Kuasa Pengguna Barang,
 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Nama : Rizki Susanto
 NIP : -
 Jabatan : Petugas BMN/Persediaan

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja No. Dokumen	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal Instansi Pusat Komisi Informasi Pusat GLP-677382-22412001 GLP-677382-22412002
Tanggal	:	31/12/2024
Tahun Anggaran	:	2024
Keterangan : Kelebihan Pembayaran Tunjik dan Uang Makan Bulan Desember 2024		
KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :		
v	Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Belanja Dibayar Di Muka Belanja Yang Masih Harus Dibayar Penyisihan Piutang Penghapusan Aset Kas Di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Koreksi Antar Beban Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	Piutang Jangka Panjang Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya Piutang Jangka Pendek Transfer Masuk Transfer Keluar Koreksi Beban Aset Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU Kas Lainnya di BLU Uang Muka Belanja Perolehan Aset Koreksi Piutang/Utang Peralatan Mesin yang belum diregister Lainnya (Persediaan yg belum diregister)

JURNAL PENYESUAIAN :				
NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Pegawai dibayar dimuka (114111)	239.620	-
	K	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK (512414)		122.140
	K	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS (512411)	-	117.480
2	D	Belanja Pegawai dibayar dimuka (114111)	1.683.000	-
	K	Belanja Uang Makan PPPK (511628)	-	105.450
	K	Belanja Uang Makan PNS (511129)	-	1.577.550

Uraian:

Pengakuan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Desember 2024

Dibuat oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024

Disetujui oleh: Muhammad Anwar
Tanggal : 31/12/2024

Direkam oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : Instansi Pusat
 Satuan Kerja : Komisi Informasi Pusat
 No. Dokumen : GLP-677382-2412003
 Tanggal : 31/12/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Tagihan KKP Bulan Desember 2024

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

	Pendapatan Diterima Di Muka		Piutang Jangka Panjang
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
	Belanja Dibayar Di Muka		Piutang Jangka Pendek
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Transfer Masuk
	Penyisihan Piutang		Transfer Keluar
	Penghapusan Piutang		Koreksi Beban Aset
	Penyusutan Aset		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Kas Lainnya di BLU
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Uang Muka Belanja
	Persediaan		Perolehan Aset
	Koreksi Antar Beban		Koreksi Piutang/Uang
	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		Peralatan Mesin yang belum diregister
	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi		Lainnya (Persediaan yg belum diregister)

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)	40.917.412	-
	K	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112)	-	40.917.412
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian:

Tagihan KKP BBM Bulan Desember 2024

Dibuat oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024

Disetujui oleh: Muhammad Anwar
Tanggal : 31/12/2024

Direkam oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : Instansi Pusat
 Satuan Kerja : Komisi Informasi Pusat
 No. Dokumen : GLP-677382-2412004
 Tanggal : 31/12/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Tagihan KKP Bulan Desember 2024

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
<input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja
<input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Perolehan Aset
<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban	<input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang
<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Peralatan Mesin yang belum diregister
<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Lainnya (Persediaan yg belum diregister)

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	357.114	
	K	Belanja Yang Masih Harus Dibayar (212112)		357.114
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian:

Tagihan KKP Operasional Bulan Desember 2024

Dibuat oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024

Disetujui oleh: Muhammad Anwar
Tanggal : 31/12/2024

Direkam oleh : Anisah Nabila
Tanggal : 31/12/2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe